

PEMIKIRAN ALI ABDURRAZIQ TENTANG HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA

Badarussyamsi

Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi

Abstrak: Artikel ini akan membahas pemikiran Ali Abdurraziq mengenai hubungan agama dan negara yang pembahasannya terus bergulir hingga saat ini. Sebagian Ormas Islam beserta kaum Muslim tertentu terus menggaungkan pentingnya pembentukan khilafah Islam untuk mengatasi persoalan kemasyarakatan. Dalam masalah kekhalifahan, Abdurraziq berpendapat bahwa kekhalifahan bukanlah rezim agama, bahwa lembaga ini tidak diisyaratkan dalam Islam, dan bahwa – terlepas dari niat para khalifah – tidaklah mungkin ada pengganti, atau khalifah yang menggantikan, kedudukan Rasulullah, karena menurut Abdurraziq, Rasul tidak pernah menjadi raja, tidak pernah berusaha mendirikan sebuah negara ataupun pemerintahan; dia adalah pembawa pesan yang diutus oleh Allah, dan dia bukan pemimpin politik. Itulah beberapa penggalan pemikiran Abdurraziq di dalam bukunya yang menghebohkan itu. Akan terlihat nantinya betapa pemikiran-pemikirannya itu begitu banyak memperoleh tanggapan yang beragam, baik yang mendukung maupun yang menentang keras dari sebagian besar kaum Muslim, khususnya di Mesir.

Kata kunci: Khilafah, Negara Islam, Piagam Madinah

Pendahuluan

Ali Abdurraziq dilahirkan di al-Sha'id, sebuah desa yang berada di wilayah al-Mania Mesir. Abdurraziq bisa dikatakan berasal dari keluarga terhormat karena ayahnya yaitu Hasan Abdul Raziq Pasya merupakan seorang feodal dan pembesar yang terpandang di Mesir pada waktu itu.¹ Bukan hanya itu, Hasan Abdul Raziq Pasya merupakan sahabat Muhammad Abduh, seorang aktivis politik yang pada tahun 1907 serta pernah menduduki jabatan sebagai wakil ketua Partai Rakyat dan memiliki hubungan dengan penjajah

¹ Dhiya' al-Din al-Rais, *Islam dan Khilafah*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985), h. 24

Inggris.² Abdurraziq sendiri bisa digolongkan sebagai murid Syekh Muhammad Abduh meskipun tidak sempat belajar banyak, mengingat ketika Abduh meninggal dunia pada tahun 1905, Abdurraziq baru berusia 17 tahun.³

Abdurraziq memulai pendidikannya di al-Azhar pada usia 10 tahun, di mana ia belajar hukum kepada Syekh Ahmad Abu Khatwah, sahabat Abduh dan murid al-Afghani. Abdurraziq juga pernah mengikuti perkuliahan di al-Jami'ah al-Mishriyah selama kurang lebih satu hingga dua tahun, dan beberapa dosen asing yang pernah diikutinya adalah Prof. Nallino yang mengajarkan sejarah peradaban Arab serta Prof. Santillana yang mengajarkan Sejarah Filsafat. Tercatat pula bahwa setahun setelah tamat dari al-Azhar, tepatnya pada tahun 1911 Abdurraziq mengajar di almamaternya pada mata kuliah Balaghah dan Sejarah. Seterusnya, pada semester genap tahun pertama tugas mengajarnya, ia melanjutkan studinya ke Oxford University untuk menekuni Ilmu Politik dan Ekonomi. Akan tetapi, dikarenakan meletusnya Perang Dunia I, maka Abdurraziq terpaksa harus kembali ke Mesir meskipun studinya belum tamat.⁴

Karir politik Abdurraziq dimulai pada tahun 1907, di mana ia menggabungkan diri dalam Partai Rakyat, suatu partai yang sengaja dibentuk sebagai tandingan bagi Partai Kebangsaan yang mempunyai hubungan dengan pemerintah Inggris. Dalam Partai Rakyat, Abdurraziq menduduki posisi sebagai wakil ketua partai.⁵ Selain itu, Abdurraziq dikenal sebagai seorang ilmuwan agama yang mempunyai kemampuan intelektual yang cukup memadai, sehingga setibanya di Mesir setelah lawatannya ke Inggris, ia langsung diangkat menjadi hakim pada Mahkamah Syari'ah di daerah al-Mansurah Mesir.⁶

Pada tahun 1915 Abdurraziq diberi kepercayaan untuk memangku jabatan hakim. Selama menjadi hakim, ia menyempatkan diri untuk melakukan studi dan penelitian tentang Sejarah Peradilan dalam Islam. Kajian ini menurutnya merupakan

² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 109

³ Dhiya' al-Din al-Rais, *Islam dan Khilafah*, h. 25

⁴ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Jambatan, 1992), h. 102

⁵ Dhiya' al-Din al-Rais, *Islam dan Khilafah*, h. 25

⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 139

prasyarat untuk mempelajari sistem pemerintahan. Hasil kajiannya kemudian dituangkan dalam bukunya yang terkenal yakni yang ia pandang sebagai kajian awalnya.

Situasi Sosial Politik yang Mempengaruhi Pertumbuhan Pemikiran

Karya intelektual Abdurraziq yang tertulis hanyalah sebuah bukunya yang berjudul *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm Bahtsu fi al-Khilâfat wa al-Hukûmat fi al-Islâm*. Meskipun karyanya hanya satu, namun demikian buku ini telah menggemparkan dunia Islam, khususnya dalam kaitannya dengan tumbuhnya sekularisme di tengah-tengah umat Islam. Buku ini juga yang telah menjadikan Abdurraziq terkenal di seantero dunia. Namun demikian, buku inilah yang telah menyebabkan Abdurraziq kehilangan jabatannya. Sebagian besar tanggapan terhadap buku ini berisi kecaman dan penolakan karena alur pemikiran dalam buku tersebut, yang bernada sekularistis, dinilai bertentangan dengan pemikiran kaum Muslim.

Dalam kaitan ini, John L. Esposito menjelaskan bahwa karya Abdul Raziq itu ditulis sebagai jawaban terhadap krisis khilafah sehabis Perang Dunia I (1914-1918). Pendudukan Sekutu atas Konstantinopel (Istambul) telah menyebabkan memuncaknya perhatian dunia Islam secara umum akan masa depan imperium Usmaniyah dan khilafah. Apapun perbedaan politik di kalangan kaum Muslim, yang jelas Eropa-Kristen telah mengancam pusat kekuasaan Islam beberapa abad serta Pan-Islam sebagai lambang kesatuan umat Islam selama ini. Pada anak benua India terbentuk gerakan khilafah (1919-1925) untuk mempertahankan kelanjutan khilafah. Seiring dengan kondisi ini, Rashid Ridla menulis buku dengan judul *al-Khilâfat* yang isinya membela kemestian restorasi khilafah.⁷

Kondisi tepatnya kemunculan buku Abdurraziq tersebut tidak bisa dilepaskan dari dihapusnya sistem khilafah oleh Kemal Attaturk. Peristiwa ini menjadikan persoalan khilafah di kalangan kaum Muslim semakin runyam. Beberapa raja Arab mulai melirikkan matanya untuk memperoleh gelar khalifah bagi dirinya di antaranya adalah Raja Fuad dari Mesir. Maka pada tahun 1925, tepatnya sesudah Rasyid Ridla menulis dalam *al-Manar* mengenai

⁷ John L. Esposito, *Islam and Politics* (Syracuse: Syracuse University Press, 1985), h. 95

pentingnya kedudukan khilafah, di sinilah buku Abdurraziq muncul untuk menolak adanya ‘fusi’ agama dan kekuasaan politik dalam Islam. Penolakan Abdurraziq terhadap posisi religius-politis ini begitu menghebohkan banyak kalangan ulama yang ortodoks kala itu.⁸

Pada tahun 1926, Pusat Pengajaran Islam Universitas al-Azhar memelopori sebuah *Caliphate Congress* yakni Musyawarah Besar untuk persoalan khalifah. Musyawarah Besar menegaskan alur kepercayaan tradisional bahwa pembentukan khilafah itu dituntut oleh hukum Islam dan merupakan suatu kemestian. Namun demikian, Musyawarah Besar tersebut mengakui bahwa khalifah dengan wewenang spiritual dan temporal adalah tidak mungkin, mengingat situasi politik yang ada. Oleh karenanya masalah tersebut sejak itu tidak memperoleh penyelesaiannya.

Sebenarnya buku Abdurraziq tersebut hanya mensinyalir bahwa Islam tidak memerintahkan dibentuknya kekhilifahan. Ketika diwawancarai oleh wartawan Bourse Egyptienne, Abdurraziq menjelaskan sebagai berikut:

“Gagasan utama dalam buku saya, yang telah membuat saya banyak dikecam, adalah bahwa Islam tidak menetapkan bentuk rejim atau pemerintahan tertentu bagi kaum Muslim menurut persyaratan yang dibuat oleh sistem itu sendiri: Islam justru memberi kita kebebasan untuk membentuk negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial dan ekonomi di sekeliling kita, dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan jaman”.⁹

Seterusnya pertanyaan kemudian mengarah secara khusus kepada masalah kekhilifahan. Abdurraziq mengulang pendapatnya bahwa kekhilifahan bukanlah rezim agama, bahwa lembaga ini tidak diisyaratkan dalam Islam, dan bahwa --- terlepas dari niat para khalifah --- tidaklah mungkin ada pengganti, atau khalifah yang menggantikan, kedudukan Rasulullah, karena menurut Abdurraziq, Rasul tidak pernah menjadi raja, tidak pernah berusaha mendirikan sebuah negara ataupun pemerintahan; dia adalah pembawa pesan yang diutus oleh Allah, dan dia bukan pemimpin politik.¹⁰ Itulah beberapa penggalan pemikiran Abdurraziq di

⁸ *Ibid.*, h. 96

⁹ Wawancara dengan Abdurraziq ini ditemukan pada Muhammad Imara, *al-Islam wa Ushul al-Hukm li Abd al-Raziq* (Beirut, 1972), h. 92

¹⁰ *Ibid.*, h. 93

dalam bukunya yang menghebohkan itu. Akan terlihat nantinya betapa pemikiran-pemikirannya itu begitu banyak memperoleh tanggapan yang beragam, baik yang mendukung maupun yang menentang keras dari sebagian besar kaum Muslim, khususnya di Mesir.

Adalah Muhammad al-Bahi yang menilai pemikiran Abdurraziq sebagai pemikiran yang berlandaskan pada pola pikir Barat sekularis yang menginginkan pemisahan antara agama dan negara. Buku *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm* bukan hanya bertujuan untuk membela sekularisme, melainkan juga memberikan legitimasi Islam terhadap sang penulis yakni sebagai pemikiran Islam yang cemerlang. Abdurraziq menghiasi pemikirannya dengan cara menta'wilkan hukum-hukum al-Kitab, al-Sunnah dan fiqh.¹¹

Penolakan keras terhadap argumen-argumen Abdurraziq datang terutama dari kalangan ulama. Para ulama mengklaim bahwa Abdurraziq telah memposisikan Islam sebagai hukum agama yang tidak ada kaitannya dengan urusan duniawi. Abdurraziq juga dituduh telah berpandangan bahwa jihad rasulullah ditujukan untuk meraih kekuasaan raja dan bukan untuk menyiarkan agama. Dengan karyanya tersebut, Abdurraziq juga diklaim telah berpandangan bahwa pemerintahan para *Khulafâ al-Râsyidûn* sebagai pemerintahan sekuler.¹² Masih banyak klaim-klaim para ulama yang dituduhkan kepada Abdurraziq, yang kesemuanya akan secara lengkap dijabarkan pada bagian pemikiran Abdurraziq.

Sementara itu, adalah Sayyid Baha'u al-din --- sebagaimana diceritakan Leonard Binder --- justru mendukung pandangan Abdurraziq. Dalam bukunya *Ayyâm Lahâ Tharîq*, Baha'u al-Din menyanjung Abdurraziq sebagai penentang utama persekongkolan antara Inggris dan Raja Fuad. Persekongkolan ini bagi Raja Fuad adalah untuk meraih kedudukan sebagai khalifah, sedangkan bagi pemerintah kolonial Inggris adalah untuk mencengkramkan pengaruhnya ke seluruh dunia Muslim. Namun demikian, Dr. al-Rayis mengupas persoalan serius bahwa Abdurraziq bukanlah

¹¹ Lihat Bushtami Muhammad Sa'id, *Gerakan Pembaharuan Agama: Antara Modernisme dan Tajdiduddin* Terj. (Bekasi: Wala Press, 1995), h. 162

¹² Leonard Binder, h. 213

pejuang sejati bagi kemerdekaan Mesir dan kurang memahami perihal kekhalifahan, kendati pendekatan yang dia gunakan tidak ada bedanya dengan ‘cerita detektif’ dengan pengutipan sumber yang kurang tepat dan banyak mengandung unsur subyektif yang membingungkan.¹³ Karya Abdurraziq dalam kenyataannya mengundang respon yang pro dan kontra di kalangan kaum Muslim sendiri.

Dalam pandangan Esposito, perdebatan di seputar karya Abdurraziq itu tidak cuma mengandung arti dalam konteks sejarah terbatas, melainkan juga mengkristalisasikan banyak persoalan yang ditimbulkan oleh sekularisme modern mengenai watak kenabian dan misi Nabi Muhammad s.a.w. --- dan dalam pengertian yang luas --- berkenaan dengan arti dan tujuan hidup seorang Muslim. Arus sekularisme tersebut berbenturan dengan keyakinan, tindakan dan lembaga-lembaga yang merupakan integrasi antara watak religius politis Islam dan kedudukan syari’ah yang demikian fundamental bagi tuntunan dan ketentuan dalam kehidupan sosial. Posisi Abdurraziq, seperti halnya dengan sekularisme liberal dewasa ini, dianggap oleh kebanyakan tokoh, sebagai jiplakan dari sekularisme Barat. Penjiplakan atas sekularisme Barat telah mengorbankan sepenuhnya pandangan dunia Islam dan mengakibatkan lumpuhnya kekuasaan Islam dalam menghadapi Barat.¹⁴

Kehadiran Abdurraziq dalam dunia pemikiran Islam di Mesir merupakan salah satu indikator bahwa meskipun Mesir dianggap sebagai pemuka nasionalisme Arab, tapi perkembangan gerakan nasionalisme lokal di Mesir telah dipengaruhi oleh nasionalisme Barat yang liberal dan sekuler, yang kesemuanya berakar pada sejarah dan identitas yang berbeda. Sekalipun kebanyakan pemimpin nasionalis Mesir adalah murid Afghani dan Abduh, tapi modernisme Islam telah membuka jalan bagi nasionalisme yang lebih sekuler. Hubungan antara Islam, negara dan masyarakat mendapat penafsiran baru dengan membatasi agama itu sebagai persoalan pribadi, bukan merupakan permasalahan kehidupan umum. Ahmad Lutfi al-Sayyid, Thaha Husain dan Ali Abdurraziq yang tadinya dipengaruhi oleh Afghani dan Abduh, merupakan

¹³ *Ibid.*, 221

¹⁴ John L. Esposito, h. 97

tokoh-tokoh utama dari gerakan nasionalisme yang lebih sekuler itu.

Pemikiran Tentang Islam dan Negara

Pemikiran Abdurraziq mengenai kaitan Islam dan politik khususnya menyangkut Islam dan negara lebih banyak merupakan respon terhadap pemikiran politik yang berkembang pada saat itu. Pemikiran kaum Muslim yang berkembang pada saat itu sungguh menginginkan dibentuknya suatu sistem pemerintahan yang berwujud khilafah. Abdurraziq tampil untuk memberikan alternatif pemikiran yang lain, karena --- sebagaimana dalam pembahasan biografi Abdurraziq --- sebagian ide untuk mendirikan kekhalifahan merupakan hasil konspirasi antara pemerintah Inggris dengan Raja Fu'ad. Konspirasi yang hanya menguntungkan beberapa pihak serta hanya demi tujuan politis semata ini jelas akan merugikan banyak pihak kalangan-kalangan.

Pemikiran Abdurraziq mengenai Islam dan masalah kenegaraan berangkat dari analisisnya mengenai misi sesungguhnya dari Nabi Muhammad SAW. Abdurraziq juga memperkuat argumennya dengan ayat-ayat al-Qur'an yang cukup banyak serta hadis-hadis Nabi mengenai fungsi dan peran dari kerasulan Muhammad SAW. Dengan landasan-landasan tersebut Abdurraziq menyatakan bahwa tidak ada keharusan di dalam Islam untuk membentuk sebuah negara atau khilafah. Di bawah ini secara runtut akan dipaparkan mengenai pemikiran Abdurraziq mengenai fungsi dan peran Nabi Muhammad SAW., yang darinya nantinya akan diketahui corak pemikiran politik Abdurraziq.

Bagi Abdurraziq Muhammad SAW. merupakan utusan untuk misi keagamaan yang penuh dengan keberagaman, bersih dari kecenderungan pada sistem kerajaan dan pemerintahan dan dia tidak memiliki pemerintahan, tidak juga memerintah, dan bahwa ia tidak mendirikan sebuah kerajaan dalam pengertian politik, baik dari term utusan sebagaimana pembawa risalah sebelumnya. Dia bukan seorang Raja, atau pendiri negara, dia tidak pernah berusaha untuk memiliki kekuasaan. Pandangan di atas mungkin bukan merupakan pandangan yang dikenal secara luas, dan dalam kenyataan mungkin tidak disenangi oleh orang-orang Islam, meskipun sebenarnya memiliki visi yang luar biasa dan bukti-bukti

yang kuat.¹⁵ Abdurraziq nampaknya memulai pemikirannya dari hakekat Nabi, baik dari segi fungsi serta misinya.

Risalah itu sendiri menurut Raziq mewajibkan kepada Rasul untuk memiliki bentuk kepemimpinan terhadap umatnya, tetapi tidak seperti kepemimpinan raja-raja dan otoritas yang mereka miliki terhadap segala aspeknya. Karena itu seseorang seharusnya tidak mempersoalkan kepemimpinan dari Risalah para raja, karena mereka itu sangat berbeda dan bisa menentangnya. Kepemimpinan Musa dan Isa terhadap pengikutnya bukanlah kepemimpinan yang bersifat monarki, melainkan lebih mirip dengan kepemimpinan kebanyakan para Rasul.¹⁶ Dua pernyataan awal ini telah menjelaskan pada kita bahwa Abdurraziq berpandangan bahwa Nabi Muhammad SAW. murni sebagai seorang utusan Tuhan dengan misi keagamaan semata-mata, tidak memiliki misi politik keduniaan sebagaimana halnya raja-raja.

Watak dari dakwah keagamaan yang jujur menurut Raziq mewajibkan pembawa Risalah untuk memiliki pengertian yang sempurna, di mana dia tidak akan kekurangan sesuatu dalam panca inderanya, sentimen-sentimen dan tidak memiliki sesuatu yang bersifat minder dan dia harus memiliki kesadaran yang kuat --- karena ia seorang pemimpin --- untuk membuat kagum orang-orang yang di sekitarnya, dan sebuah sikap yang akan menjadikannya cukup simpatik hingga laki-laki dan perempuan akan mencintainya. Dia juga harus memiliki kesempurnaan spiritual, yang berguna bagi komunikasinya dengan dunia lain.¹⁷

Risalah tersebut menghendaki pembawanya untuk menengahi perbedaan sosial di kalangan umatnya, dan sebagaimana telah dikatakan bahwa “Tuhan tidak akan mengangkat seorang Rasul kecuali dia dicintai umatnya dan dia memiliki otoritas terhadap kelompoknya”. Risalah tersebut juga menghendaki pembawanya untuk memiliki kemampuan tersendiri yang akan memperhatikan dakwahnya. Karena Allah SWT. Tidak menggunakan risalah tersebut dan mengangkat seorang utusan kecuali jika ia ingin

¹⁵ Ali Abdul Raziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm Bahtsu fi al-Khilâfat wa al-Hukûmat fi al-Islâm* (Beirut: Dar Maktabat al-Hayah, 1978), h. 136

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid.*, h. 137

dakwahnya diperhatikan, dan ajaran-ajarannya diabadikan dalam realitas dunia.¹⁸

Kaitannya dengan hal tersebut, Abdurraziq mengutip beberapa ayat al-Qur'an antara lain, "Dan kami tidak mengutus seorang Rasul kecuali untuk ditaati dengan seizin Allah" (Qs. 4:64). "Dan sungguh telah diperolok-olokkan para Rasul sebelum kamu; maka turunlah kepada orang-orang yang mencemooh balasan untuk mereka sendiri. Katakanlah: 'Berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah apa yang terjadi terhadap orang-orang yang mendustakan itu' (Qs. 6:10-11). "Dan Allah menghendaki untuk membenarkan dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir, agar Allah menetapkan kebenaran dan membatalkan kebatilan walaupun orang-orang yang berdosa tidak menyukainya (Qs. 8 ayat 78). Dengan ayat-ayat ini Abdurraziq menegaskan bahwa status Risalah tersebut memberikan sebuah otoritas yang kuat bagi pembawanya dibandingkan otoritas yang ada di antara penguasa dengan rakyat, bahkan lebih kuat daripada otoritas seorang ayah kepada anaknya.¹⁹

Menurut Abdurraziq, Rasul dapat menangani politik umatnya, namun Rasul memiliki tugas yang unik yang tidak bisa didelegasikan kepada orang lain, karena berhubungan dengan rintangan visual agar dapat melihat hati yang terdapat dalam dada. Dia memiliki hak, dan dia harus membuka hati para pengikutnya agar dapat mencapai sumber-sumber cinta dan kebenaran, kebaikan dan kejahatan, wacana-wacana pemikiran, obsesi, asal-usul, pamrih, tempat bersemayam moralitas. Dia merupakan karya terbuka dalam hal politik secara umum dan karya tersembunyi --- dalam hal mengelola hubungan antara mitra, aliansi-aliansi, majikan dan budak, orang tua dan anak, dan hubungan-hubungan yang hanya dimiliki suami istri.²⁰

Bagi Abdurraziq, ternyata Risalah Rasulullah SAW. dikhususkan dalam berbagai hal, yang tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya karena dia diutus dengan misi dakwah. Tuhan memilihnya untuk menyatukan umat manusia dan Tuhan menakdirkan bahwa dia mengantarkan keseluruhannya, dan ia memimpinkannya untuk menyempurnakan dakwah agama, agar

¹⁸ *Ibid.*, h. 137-138

¹⁹ *Ibid.*, h. 138

²⁰ *Ibid.*, h. 138-139

kelemahlembutan ditegakkan dan menghindari konflik dan agar semua agama dapat mencapai Tuhan. Risalah ini memberi pembawanya kesempurnaan yang ekstrim yang seharusnya diupayakan oleh manusia untuk mncapainya. Bentuk kekuatan sosiologis yang merupakan batas akhir dari apa yang telah ditakdirkan bagi Rasul-rasul terpilih dan cukuplah dukungan Tuhan yang akan sesuai dengan dakwah agung dan umum ini.²¹

Oleh karenanya menurut Abdurraziq otoritas Nabi SAW. adalah karena adanya Risalah, suatu otoritas umum; perintah-perintahnya kepada umat Islam dipatuhi; dan pemerintahannya bersifat menyeluruh. Tidak ada orang yang memegang pemerintahan dapat mencapai apalagi melampaui otoritas Nabi SAW. dan memiliki bentuk kepemimpinan atau otoritas yang imajiner dibandingkan Rasulullah SAW., bahkan pemerintahan umat Islam setelahnya.²² Otoritas Rasulullah SAW, tersebut berasal dari surga, dari Allah, yang wahyu-wahyu-Nya disampaikan oleh para malaikat. Kekuatan suci ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman yang ditetapkan Rasul-Nya, tidak berpegang dalam makna kerajaan ataupun menyerupai kekuatan para raja, dan (otoritas) para sultan. Inilah panggilan kepemimpinan yang benar di sisi Allah dan penyampaian risalahnya bukan kepemimpinan yang bersifat kerajaan. Ini merupakan sebuah risalah dan agama, dan merupakan pemerintahan kenabian, bukan kesultanan.²³

Abdurraziq mengingatkan pembaca agar tidak bingung dengan dua jenis pemerintahan tersebut dan tidak mempertentangkan kedua jenis perwalian --- dari Rasul mengenai kenabiannya, dan perwalian dari Raja yang kuat. Perwalian para Rasul tersebut terhadap umat-umatnya menurut Raziq merupakan sebuah perwalian spiritual yang berasal dari keimanan, dan kepatuhan hati yang diikuti oleh amal saleh. Di sisi lain, perwalian dari penguasa merupakan perwalian yang bersifat material. Ia bergantung kepada tubuh-tubuh yang lemah yang sama sekali tidak berhubungan dengan hati. Sedangkan yang terdahulu merupakan perwalian yang tertuju menuju pada Allah, dan yang berikutnya untuk mengatur persoalan-persoalan kehidupan di muka bumi. Sementara yang pertama merupakan agama dan yang kemudian adalah dunia. Yang

²¹ *Ibid.*, h. 139

²² *Ibid.*, h. 140

²³ *Ibid.*, h. 140-141

pertama merupakan kepemimpinan religius, dan yang kedua merupakan kepemimpinan politik --- dan terdapat banyak perbedaan antara agama dan politik.²⁴

Pernyataan-pernyataan tersebut semakin memperjelas bahwa untuk mendukung pandangannya yang pertama di mana Nabi Muhammad hanya diutus untuk misi keagamaan dan kerasulan, Raziq membedakan antara otoritas yang dimiliki Nabi dengan otoritas raja-raja. Otoritas Nabi menurut Raziq adalah otoritas risalah dan otoritas keagamaan yang bersifat spiritual, suci dan langsung berasal dari Tuhan. Sedangkan otoritas raja-raja adalah otoritas keduniaan belaka dan bersifat materialis, di mana asal otoritas ini juga bersifat manusiawi dan duniawiyah.

Secara tegas Abdurraziq menyatakan bahwa ia tidak meragukan bahwa Islam menetapkan kesatuan keagamaan ataupun bahwa kaum Muslim membentuk sebuah kelompok yang terunifikasi; atau bahwa Nabi SAW. telah menyerukan kesatuan politik dan pada kenyataannya telah berhasil untuk mencapainya sebelum ia wafat; ataupun dia mengedepankan kesatuan keagamaan ini sebagai satu-satunya imam shalat, sebagai pengaturnya yang kuat, sebagai pemimpin yang perintah-perintahnya tidak dipertanyakan lagi. Dalam kerangka kesatuan keagamaan ini, Rasulullah SAW. berjuang dengan seluruh kekuatannya dan dengan dukungan-dukungan kemenangan dari Tuhan telah berhasil melakukan penaklukan. Rasulullah SAW. memiliki otoritas tertentu terhadap umatnya bahwa tidak ada raja sebelumnya atau sesudahnya, karena dia memiliki semacam otoritas terhadap umatnya yang tidak pernah dimiliki oleh raja sebelum dan sesudahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah “Nabi itu lebih dekat kepada ketaatan daripada mereka sendiri” (Qs. 33:6), “Tidaklah patut bagi laki-laki dan perempuan yang mukmin memiliki pilihan (selain) atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata” (Qs: 33:36).²⁵

Menurut Abdurraziq, orang yang ingin mengistilahkan kesatuan keagamaan ini menjadi negara otoritas Nabi SAW. --- merupakan sebuah otoritas absolut --- sebuah kerajaan atau

²⁴ *Ibid.*, h. 141

²⁵ *Ibid.*, h. 142-143

kekhalfahan ataupun Nabi itu sendiri sebagai seorang raja, khalifah, sultan dan lain-lain, bebas melakukan hal yang demikian, karena ini merupakan kajian semantik yang seharusnya tidak berhenti sampai di sini saja. Yang terpenting dari apa yang telah kita katakan adalah makna, dan bahwa kita tentu telah dengan seksama mengkhususkannya kepada pembaca. Hal yang krusial bagi Raziq adalah mengetahui apakah model kepemimpinan Rasulullah SAW., menurut rakyatnya, adalah kepemimpinan risalah, atau kepemimpinan seperti seorang raja. Apakah aspek-aspek yang berbeda dari perwaliannya adalah aspek-aspek dari sebuah negara politik atau sebuah kepemimpinan keagamaan. Apakah di balik kesatuan ini, di mana Rasulullah SAW. memimpin suatu kesatuan sebuah negara dan pemerintahan atau sebuah kesatuan agama yang serasi, bukan sebuah hal yang bersifat politik. Akhirnya, apakah dia hanya seorang Rasul atau seorang raja sekaligus sebagai seorang Rasul.²⁶

Keagungan al-Qur'an menurut Raziq mendukung pandangan bahwa Rasulullah SAW. tidak bermaksud untuk bertindak sebagai seorang raja yang politis. Ayat-ayat al-Qur'an menegaskan aktivitasnya tidak lebih daripada menyampaikan risalah, yang bebas dari semua pengertian otoritas. "Barangsiapa yang mentaati Rasul, sungguh ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), (ingatlah) kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka" (Qs. 4:80). "Dan kaummu mendustakannya (azab), padahal azab itu benar adanya. Katakanlah: 'Aku bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu'. Untuk tiap-tiap kenabian ada waktunya; dan kelak kamu akan mengetahui" (Qs. 6:66-67)

Abdurraziq menyatakan bahwa al-Qur'an secara tegas melarang Nabi saw. untuk bertindak sebagai seorang penjaga manusia, atau pengawas mereka, atau seorang penakluk, atau seorang penguasa. Selain itu, dia tidak memiliki hak untuk memaksa orang-orang menjadi orang-orang yang beriman. Lagi pula, tambah Raziq, dia bukan seorang penjaga atau seorang penguasa, dan bukan seorang raja; karena prasyarat untuk sebuah kerajaan adalah dominasi dan kekuatan, yang menentukan otoritas tanpa batas. Dia bukan seorang pengawas bagi rakyatnya, juga bukan seorang raja. Allah SWT. Berfirman: "Muhammad itu

²⁶ *Ibid.*, h. 143

bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, melainkan Rasul dan penutup nabi-nabi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Qs. 3:40).²⁷

Ditambahkan pula oleh Abdurraziq bahwa al-Qur’an secara jelas mengatakan bahwa Muhammad SAW. tidak memiliki hak terhadap rakyatnya kecuali menyampaikan risalah; dan jika ia seorang raja, ia akan memiliki hak untuk memerintah manusia, karena raja-raja memiliki hak-hak lain selain risalah itu dan sumber-sumber legitimasi lainnya selain risalah dan suatu pengaruh yang lain dari pengaruhnya. “Katakanlah: ‘Aku tidak berkuasa menarik manfaat bagi diriku dan tidak pula menolak *mudlarat* kecuali atas kehendak Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku akan memperbanyak kebajikan dan aku tidak akan ditimpa kemudlaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman” (Qs. 7:188)”.²⁸

Otoritas risalah pada diri Nabi Muhammad menurut Raziq bukan hanya menyebabkan Nabi memiliki misi keagamaan dan tidak memiliki misi kekuasaan politis, namun lebih jauh dari itu. Otoritas risalah dengan misi keagamaan juga --- ditambahkan Raziq --- telah melarang Nabi bertindak laksana raja, semisal mengawasi mereka, membuat keharusan-keharusan tanpa batas berupa apapun kepada rakyat dan pengikutnya. Nabi menurut Raziq --- dengan berlandaskan pada al-Qur’an --- tidak diperkenankan menaklukkan mengawasi, menaklukkan, mengharuskan ataupun memaksa masyarakat untuk beriman kepada Allah. Sikap-sikap seperti ini menurut Raziq hanya dimiliki oleh raja dengan kekuasaan yang dominan serta absolut, dan bukan sikap dan sifat Nabi.

Dengan mendasarkan pada beberapa ayat al-Qur’an tersebut, kembali Raziq menegaskan bahwa al-Qur’an secara jelas menegaskan bahwa Muhammad SAW. hanyalah seorang Rasul sebagaimana rasul-rasul lainnya terdahulu, dan al-Qur’an juga secara jelas menegaskan bahwa ia hanyalah menyampaikan risalah Tuhan kepada manusia dan tidak bertugas untuk melakukan sesuatu kecuali menyampaikan risalah itu. Ia tidak berkewajiban untuk menjamin orang-orang menerima apa yang disampaikannya

²⁷ *Ibid.*, h. 145

²⁸ *Ibid.*, h. 146

kepada mereka, bukan juga kewajiban baginya untuk memaksa mereka mempercayai apa yang dibawanya. “Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang” (Qs. 5:92).

Di samping mendasarkan argumennya pada *nash-nash* al-Qur’an, Abdurraziq juga menukil beberapa hadis untuk semakin memperkuat argumennya mengenai fungsi dan peran Rasul dan Risalahnya. Abdurraziq mengutip sebuah periwayatan yakni bahwa salah seorang penulis biografi Nabi, menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang datang menghadap Nabi Saw. untuk menangani suatu masalah. Saat orang tersebut berdiri di depan Nabi SAW., badannya kemudian menggigil dan ketakutan yang luar biasa menghampirinya. Nabi SAW. berkata: “Tenanglah, saya bukan raja atau seorang penakluk, saya putra seorang perempuan Qurays yang biasa makan daging kering di Mekah”. Hal itu juga telah dikatakan dalam sebuah hadis, ketika Nabi diberikan pilihan oleh Malaikat Israfil, menjadi seorang raja sekaligus Nabi atau menjadi seorang Nabi saja, Nabi SAW. memandang (Malaikat) Jibril sebagai konsultannya. Jibril memandang ke bumi, menunjukkan kerendahan hati. Sebagaimana kisah selanjutnya, Jibril menunjukkan kepadanya untuk menjadi seorang yang rendah hati. Sehingga Nabi SAW. berkata: “Seorang Nabi yang mengabdikan”. Dari keterangan itu semakin jelas bahwa Nabi SAW. bukan seorang raja dan tidak meminta pangkat sebagai raja serta tidak juga menginginkannya.²⁹

Seperti layaknya seorang ahli debat, Abdurraziq mengajak semua kalangan untuk berdebat secara obyektif, sembari menyatakan;

Carilah di antara dua cakupan al-Qur’an untuk bukti yang terbuka atau yang tersembunyi yang mendukung pemikiran yang mengatakan bahwa agama Islam memiliki sebuah karakter politik dan kemudian mencari bukti, sama sulitnya seperti yang Anda dapat lakukan, di antara hadis Nabi SAW. --- sumber-sumber agama yang murni ini yang berada dalam genggamannya, yang dekat dengan Anda. Jika Anda harus mendapatkan bukti daripadanya, atau sesuatu yang semacam itu, Anda tidak akan

²⁹ *Ibid.*, h. 150-151

menemukannya, yang ada hanya dugaan-dugaan, dan dugaan yang tidak dapat menggantikan kebenaran.³⁰

Islam bagi Abdurraziq adalah sebuah agama yang menyeru kepada Tuhan dan sebuah aliran pemikiran, di antara banyak aliran yang berusaha memperbarui tipe masyarakat tertentu, dan membimbing mereka kepada apa yang membuatnya lebih dekat kepada Allah SWT., dan membuka jalan menuju kebahagiaan yang abadi, yang telah dipersiapkan untuk hamba-Nya yang baik. Islam adalah sebuah kesatuan agama yang ditunjukkan Tuhan sebagai sebuah ikatan yang mengikat seluruh manusia, yang dengannya manusia dapat mengelilingi seluruh belahan dunia.³¹ Ini berarti, secara implisit Raziq menolak sebagian pandangan kaum Muslim bahwa Islam memiliki visi dan misi politik tertentu.

Abdurraziq juga menambahkan bahwa Islam merupakan sebuah seruan suci bagi manusia di dunia ini, baik orang-orang Arab maupun orang-orang Afrika, di mana mereka menjadi yakin akan keesaan Tuhan dan menjadi satu bangsa yang menyembah satu Tuhan, serta menjadi bersaudara dalam pengabdian pada-Nya. Islam adalah suatu panggilan kepada contoh yang tertinggi dari perdamaian dunia. Bahwa hal itu diadopsi dengan kesempurnaan yang sesuai dengannya (dunia). Seterusnya, bagi Raziq Islam adalah sebuah seruan kepada kebahagiaan yang telah dipersiapkan Tuhan untuk dunia, karena hal ini adalah karunia dari langit dan bumi serta rahmat Tuhan bagi dunia ini. Seruan terhadap dunia untuk menjadi sebuah persaudaraan merupakan seruan yang masuk akal. Terdapat sebuah kesiapan dalam sifat dasar manusia untuk mencapainya.³²

Berangkat dari hakekat misi Nabi yang hanya bermisikan keagamaan dan jauh dari misi-misi politik, Abdurraziq merambah pada sebuah pandangan yang bisa dikatakan agak berani di mana dia juga mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang murni menyeru kepada keesaan Tuhan semata-mata. Islam bagi Raziq tidak memiliki karakter politik, karena ia hanya seruan suci agar manusia mengabdikan kepada Allah, bersaudara dengan yang lain dalam rangka pengabdian kepada-Nya serta sebuah panggilan untuk perdamaian dunia. Di sinilah kiranya pandangan Raziq yang

³⁰ *Ibid.*, h. 151

³¹ *Ibid*

³² *Ibid.*, h. 151-152

berani dan sekaligus permulaan sebuah pemikiran yang nantinya disebut-sebut orang sebagai sebuah sekulerisme.

Abdurraziq menambahkan bahwa adalah masuk akal untuk mengatakan bahwa semua umat manusia dapat diatur ke dalam satu kesatuan agama. Namun, kepegangan seluruh dunia pada satu pemerintahan dan dikelompokkan pada satu kesatuan politik bersama akan bertentangan dengan sifat dasar manusia dan tidak berhubungan dengan kehendak Tuhan. Karena hal ini merupakan tujuan duniawi, dan Tuhan telah memberikannya sebuah masalah untuk dipecahkan oleh pemikiran kita, dan telah membiarkan orang-orang untuk bebas mengaturnya dalam hal bahwa pemikiran, pengetahuan, kepentingan, hasrat dan kecenderungan mereka akan membimbing mereka. Kebijakan Tuhan dalam tujuan ini adalah untuk memelihara perbedaan-perbedaan di antara mereka.³³ Pandangan Raziq ini sepertinya lebih mengarah pada penolakan dia atas keinginan sebagian umat Islam untuk menyatukan dunia Islam di bawah satu kekhalifahan Islam.

Abdurraziq kemudian memperkuat argumennya di atas dengan beberapa ayat al-Qur'an antara lain; "Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu" (Qs. 11:118-119). Di samping itu, supaya masyarakat tetap terus berlomba-lomba, sehingga populasi (bumi) dapat dicapai. "Seandainya Allah tidak mencegah keganasan manusia atas yang lainnya, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Tuhanlah yang memiliki karunia yang dicurahkan pada manusia di dunia ini" (Qs. 2:251). Dengan demikian, tujuan kitab suci itu dapat dicapai dan kehendak Tuhan dapat dilaksanakan.³⁴

Menurut Abdurraziq, hal itu merupakan salah satu urusan duniawi di mana Nabi SAW. telah menyangkal sendiri hak untuk memberikan penilaian atau arbitrase. Karena ia menyatakan bahwa "kamu lebih mengetahui tentang urusan-urusan duniamu". Ini merupakan suatu urusan duniawi; dan dunia dari permulaan hingga akhir, dan segala macam urusan dan tujuan yang dicakupnya, adalah terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengaturnya dengan sesuatu apapun di samping akal yang dianugerahkan-Nya kepada kita, dan perasaan serta hasrat yang telah Tuhan tempatkan di

³³ *Ibid.*, h. 153

³⁴ *Ibid*

dalamnya, dan demikian juga nama-nama serta hal-hal yang telah Tuhan ajarkan kepada kita; semua ini terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengangkat seorang utusan untuk melakukannya, dan juga terlalu mudah bagi Rasul-rasul untuk melakukan hal itu.³⁵ Dengan argumennya ini, Raziq menilai bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keduniaan, termasuk politik di dalamnya, oleh Nabi telah diserahkan sepenuhnya kepada umat untuk mengaturnya.

Dengan gaya persuasifnya, kembali Abdurraziq mengingatkan kaum Muslim bahwa menurutnya kaum Muslim tidak dikejutkan oleh sesuatu yang mungkin ia amati dalam biografi Nabi SAW., yang boleh jadi kelihatannya seperti pekerjaan pemerintah, seolah mencerminkan bentuk kerajaan dan kenegaraan. Jika kita meneliti dengan cermat, maka menurut Abdurraziq hal itu tidak akan diketemukan. Hal itu lebih merupakan sebuah alat semata yang dipakai Nabi SAW. untuk memperkuat agamanya, untuk mendukung seruan itu.³⁶ Bagi Raziq, segala urusan dan perbuatan Nabi yang --- seolah-olah --- berhubungan dengan politik, kekuasaan ataupun pemerintahan semata-mata hanya suatu sarana untuk menyukseskan misi kenabian dan kersalahan Nabi.

Oleh karenanya menurut Abdurraziq, tidak hanya al-Qur'an yang melarang kita untuk berpikir bahwa Nabi SAW. mengajak kita, melalui risalah keagamaannya untuk mendirikan sebuah negara politik. Juga tidak hanya sunnah yang melarang kita untuk berbuat demikian. Alih-alih, bersama dengan kitab dan sunnah muncullah kebijaksanaan akal dan apa yang diisyaratkan oleh makna risalah tersebut dan watak alami, karena perwalian Muhammad SAW. terhadap kaum beriman adalah juga perwalian risalah tersebut, yang dimurnikan oleh apapun yang berhubungan dengan pemerintahan. Abdurraziq dengan tegas menyatakan, "Buanglah itu semua, karena tidak ada pemerintahan, tidak ada negara, dan tidak ada kecenderungan-kecenderungan terhadap politik, tidak juga tujuan-tujuan para raja dan para pemberi perintah".³⁷ Dalam konteks ini, Abdurraziq kembali mengajak kaum Muslim untuk tidak salah paham dalam menilai misi kenabian Muhammad SAW. Muhammad SAW. --- sekali lagi

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid.*, h. 154

³⁷ *Ibid.*, h. 155

Raziq menegaskan --- tidak pernah menyuruh umatnya untuk mendirikan negara. Bahkan lebih dari itu, misi kenabian Muhammad SAW., menurut Raziq bersih dari kecenderungan politik.

Penutup

Abdurraziq dapat digolongkan sebagai pemikir Muslim yang menolak menjadikan Islam sebagai landasan politik bagi sebuah negara Islam. Abdurraziq secara tegas menyatakan bahwa Islam bukanlah negara dan Nabi Muhammad tidak menyuruh umatnya untuk mendirikan negara Islam melainkan mengembangkan kebaikan di dunia. Abdurraziq menyatakan bahwa sekarang kaum Muslim telah dituntun kepada apa yang ditanyakannya tentang kurangnya aspek pemerintahan ataupun tujuan dari sebuah negara selama masa kenabian. Sekarang pembaca mengetahui bahwa tidak ada organisasi pemerintahan, maupun orang-orang yang diberi kepercayaan ataupun para hakim, sebuah kursi pemerintahan, dan sebagainya. Dengan penuh harapan, kegelapan dilema yang saat ini dihadapi kaum Muslim diubah dan api telah diubah menjadi kesejukan dan tenangnya pikiran.

Daftar Pustaka

- Al-Rais, Dhiya' al-Din. *Islam dan Khilafah*, terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- Esposito, John L. *Islam and Politics*, Syracuse: Syracuse University Press, 1985.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Raziq, Ali Abdul. *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm Bahtsu fi al-Khilâfat wa al-Hukûmat fi al-Islâm*, Beirut: Dar Maktabat al-Hayah, 1978.
- Syadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Sa'id, Bushtami Muhammad. *Gerakan Pembaharuan Agama: Antara Modernisme dan Tajdiduddin* Terj. Bekasi: Wala Press, 1995.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Jambatan, 1992.
- Wawancara dengan Abdurraziq ini ditemukan pada Muhammad Imara, *al-Islam wa Ushul al-Hukm li Abd al-Raziq*, Beirut, 1972.